

**HUBUNGAN EKSPOSUR MEDIA SOSIAL TERHADAP TINGKAT
PARTISIPASI MAHASISWA DALAM AKSI DEMONSTRASI TAHUN
2025**

**Tugas Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik**

Oleh

DIAN CAHYA UTAMI

NPM 2456041044



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam dua dekade terakhir, karena pentingnya teknologi komunikasi dalam kehidupan sosial-politik masyarakat, banyak penelitian telah dilakukan tentang hubungan antara media sosial dan keterlibatan mahasiswa dalam demonstrasi. Menurut sejumlah penelitian, baik di tingkat nasional maupun internasional, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk hiburan dan interaksi sosial, tetapi juga berfungsi sebagai tempat baru untuk partisipasi politik, termasuk unjuk rasa, protes, dan gerakan sosial.

Penelitian yang dilakukan di Indonesia sangat beragam. Ariyanto melakukan penelitian (2019) tentang gerakan Reformasi Dikorupsi. Studi ini menunjukkan bahwa Twitter dan Instagram adalah platform utama yang digunakan siswa untuk menyebarkan masalah, membangun narasi politik, dan menggalang massa. Studi ini menemukan bahwa paparan siswa terhadap konten politik di media sosial memengaruhi keterlibatan mereka, baik dalam bentuk opini publik (seperti posting, retweet, atau komentar) maupun aksi nyata. Hasil penelitian ini sangat penting karena menunjukkan bahwa media sosial melakukan dua fungsi: menjadi sumber informasi dan menjadi alat mobilitas.

Selain itu, Nurhaliza (2021) melakukan penelitian di Makassar tentang hubungan antara kesadaran politik mahasiswa dan intensitas penggunaan media sosial. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang sering terpapar informasi politik melalui media sosial memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang jarang terpapar informasi tersebut. Namun, penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran politik belum tentu menghasilkan partisipasi yang signifikan. Sebagian mahasiswa memilih untuk tidak terlibat langsung dalam demonstrasi, memilih untuk menyatakan pendapat politiknya hanya melalui platform digital. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran politik dan tindakan politik berbeda. Oleh karena itu, peran eksposur media sosial masih perlu dipahami lebih dalam.

Pratama (2023) melakukan penelitian tambahan yang melihat bagaimana paparan media sosial berdampak pada sikap kritis mahasiswa di Yogyakarta. Studi ini menemukan bahwa

keberanian mahasiswa untuk menyuarakan pendapatnya terkait erat dengan paparan media sosial terhadap konten yang berkaitan dengan masalah sosial-politik. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aksi dipengaruhi oleh banyak faktor. Lingkungan kampus, organisasi mahasiswa, dan konteks politik lokal adalah semua faktor yang berperan. Dengan kata lain, media sosial memengaruhi partisipasi, tetapi tidak dapat dianggap sebagai faktor utama.

Sebaliknya, Siregar (2024) dalam studinya tentang partisipasi politik digital siswa di Jakarta menemukan bahwa, jika dibandingkan dengan media arus utama, siswa cenderung lebih mempercayai informasi yang mereka peroleh dari teman sebaya di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan generasi muda terhadap sumber informasi telah berubah. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyampaikan masalah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk membentuk pendapat kolektif yang lebih dipercaya karena dianggap asli dan dekat dengan kenyataan. Menurut penelitian ini, media sosial telah menjadi ruang publik baru yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan mendorong keterlibatan sosial mahasiswa.

Selain itu, penelitian di luar negeri memberikan perspektif yang signifikan. Misalnya, Kaur dan Gupta (2022) mempelajari penggunaan media sosial dalam demonstrasi petani India. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial mempercepat arus informasi, memperkuat solidaritas lintas daerah, dan menyebarkan cerita yang berbeda dari pemerintah atau media konvensional. Anak-anak muda, terutama mahasiswa, aktif mengelola konten digital dan memanfaatkannya sebagai alat perlawanan politik. Hasilnya relevan karena menunjukkan bagaimana media sosial dapat memperluas jaringan solidaritas dan meningkatkan kesadaran kolektif tentang gerakan sosial.

Selain itu, studi Tufekci (2017) tentang Occupy Wall Street dan gerakan Arab Spring juga relevan. Ia menekankan bahwa media sosial menjadi alat penting untuk memobilisasi massa secara cepat, tetapi mereka juga memiliki kekurangan, seperti ketergantungan pada tren sesaat dan kekurangan organisasi yang kuat. Penelitian ini memperingatkan bahwa meskipun media sosial dapat meningkatkan partisipasi spontan, untuk mempertahankan gerakan perlu ada rencana organisasi yang matang.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial dapat membantu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam berbagai konteks. Namun, sebagian besar penelitian fokus pada hubungan antara intensitas penggunaan media sosial dan kesadaran politik. Tidak banyak penelitian yang secara khusus membahas hubungan antara penggunaan media sosial dan tingkat partisipasi mahasiswa dalam demonstrasi di Indonesia tahun 2025. Meskipun demikian, fenomena tahun 2025 diperkirakan akan berbeda karena penggunaan platform visual seperti TikTok dan Instagram Reels serta penggunaan Twitter/X sebagai media utama untuk menyebarkan masalah politik di kalangan mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah (gap) tersebut dengan mempelajari secara lebih rinci bagaimana penggunaan media sosial berkorelasi dengan partisipasi mahasiswa dalam demonstrasi terkini, serta seberapa besar keterlibatan mahasiswa dengan informasi digital dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan di dunia nyata, dari sekadar mengklik di internet.

2.2 LANDASAN TEORI

Fenomena yang diteliti—hubungan antara paparan media sosial dan tingkat partisipasi mahasiswa dalam demonstrasi pada tahun 2025—dibahas melalui landasan teori. Tiga tingkat teori—grand theory, middle range theory, dan applied theory—digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung analisis. Konsep-konsep relevan yang berasal dari teori-teori utama juga mendukung penelitian ini.

2.2.1 Grand Theory: Teori Komunikasi Massa

Grand theory dalam penelitian ini adalah teori komunikasi massa karena dapat membantu kita memahami bagaimana media, termasuk media sosial, dapat memengaruhi perilaku dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan. Komunikasi massa pada dasarnya adalah proses menyampaikan pesan kepada audiens yang luas, heterogen, dan anonim melalui media tertentu. Komunikasi massa telah berkembang ke era digital berkat kemajuan teknologi komunikasi. Saat ini, media sosial adalah cara utama untuk menyebarkan pesan politik dan sosial.

Komunikasi massa memiliki lima peran penting, menurut McQuail (2010): memberikan informasi; mempertahankan nilai sosial dan budaya yang konsisten; memberikan hiburan; dan melakukan mobilitasi. Karena fakta bahwa media sosial memiliki kemampuan untuk mendorong massa untuk melakukan tindakan kolektif, seperti demonstrasi, fungsi

mobilisasi ini sangat relevan untuk penelitian ini. Karena pesan dapat tersebar secara viral dan menjangkau ribuan bahkan jutaan pengguna dalam waktu singkat, mobilitas media sosial biasanya berlangsung cepat dan spontan.

Media sosial menjadi tempat penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan pendapat, membangun jaringan solidaritas, dan merencanakan aksi. Mahasiswa bukan hanya pengguna informasi, tetapi mereka juga membuat pesan politik yang dapat memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, teori komunikasi massa memberikan dasar makro untuk memahami bagaimana penggunaan media sosial dapat memengaruhi kesadaran politik mahasiswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam demonstrasi.

2.2.2 Middle Range Theory: Teori Uses and Gratifications

Sebagai middle range theory, teori Uses and Gratifications (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1974) menekankan peran aktif audiens dalam menggunakan media. Teori ini didasarkan pada gagasan bahwa orang memiliki kebutuhan tertentu dan secara sadar memilih media yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan kata lain, media tidak hanya berfungsi sebagai agen yang memengaruhi audiens, tetapi audiens juga berperan aktif dalam menentukan bagaimana media digunakan.

Ada empat kebutuhan yang dijelaskan dalam teori ini. Yang pertama adalah kebutuhan informasi, yang berarti keinginan untuk mengetahui apa yang terjadi dan masalah apa yang sedang terjadi; kedua adalah kebutuhan identitas pribadi, yang berarti memperkuat identitas diri, nilai, dan keyakinan; ketiga adalah kebutuhan untuk integrasi dan interaksi sosial, yang berarti membangun hubungan dan solidaritas dengan orang lain; dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk hiburan, yang berarti mencari sesuatu untuk melepaskan diri dari rutinitas. Dalam hal penggunaan media sosial, kebutuhan tersebut sangat terlihat. Mahasiswa menggunakan media sosial untuk mencari informasi tentang kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, memperkuat identitas kolektif sebagai agen perubahan, membangun solidaritas sesama mahasiswa dan masyarakat sipil, dan mengorganisir demonstrasi sebagai bentuk perlawanan politik.

2.2.3 Applied Theory: Teori Partisipasi Politik

Untuk memahami keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas non-elektoral, seperti demonstrasi, teori partisipasi politik digunakan. Menurut Verba, Nie, dan Kim (1978),

partisipasi politik adalah kegiatan individu atau kelompok yang berusaha memengaruhi kekuasaan politik, pengambilan keputusan, atau kebijakan pemerintah secara langsung atau tidak langsung. Partisipasi politik dapat berbentuk partisipasi elektoral (misalnya memberikan suara dalam pemilu) dan partisipasi non-elektoral (misalnya diskusi politik, protes, petisi, atau demonstrasi). Demonstrasi mahasiswa termasuk dalam kategori partisipasi politik non-elektoral, karena bertujuan memberikan tekanan politik kepada pemerintah agar memperhatikan aspirasi publik.

Teori partisipasi politik membantu penelitian ini memahami bagaimana paparan media sosial memengaruhi kesadaran mahasiswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam demonstrasi. Media sosial memudahkan mobilisasi partisipasi karena dapat membangun solidaritas, menyebarkan seruan aksi, dan membangun identitas kolektif. Dengan kata lain, teori ini membahas hubungan langsung antara partisipasi mahasiswa dalam demonstrasi dan iklan media sosial.

2.2.4 Konsep-Konsep yang Relevan

Eksposur Media Sosial

Keterpaparan seseorang terhadap informasi, pesan, atau konten yang beredar di platform media sosial disebut eksponur media sosial. Eksposur ini memiliki beberapa dimensi, seperti intensitas (lamanya penggunaan), frekuensi (seberapa sering diakses), dan kedalaman (keterlibatan aktif, seperti berbagi, berbagi, atau membuat konten). Dalam politik, keterpaparan media sosial mengacu pada keterpaparan individu terhadap isu-isu sosial dan politik yang sedang berkembang. Jika siswa sering terpapar konten politik di media sosial, ini dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu publik dan juga dapat mempengaruhi kecenderungan mereka untuk mengambil bagian dalam demonstrasi.

Partisipasi Mahasiswa dalam Aksi Demonstrasi

Ada dua jenis partisipasi mahasiswa dalam demonstrasi: (1) partisipasi aktif, yang berarti berpartisipasi secara langsung dalam demonstrasi di lapangan, seperti berorasi, berjalan bersama massa, atau menghadiri demonstrasi; dan (2) partisipasi pasif, yang berarti mendukung

secara tidak langsung. Partisipasi mahasiswa dalam penelitian ini dilihat sebagai bagian dari identitas kolektif mereka sebagai agen perubahan selain sebagai tindakan individual. Dengan kata lain, demonstrasi mahasiswa adalah ekspresi politik dan solidaritas sosial yang didorong oleh mobilisasi dan informasi melalui media sosial.

2.3 KERANGKA BERPIKIR

Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir sebagai pijakan konseptual untuk menjelaskan jalan penelitian, hubungan antarvariabel, dan gambaran alur pikiran peneliti dalam memahami fenomena. Tujuan kerangka berpikir ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara paparan media sosial dan tingkat partisipasi mahasiswa dalam demonstrasi pada tahun 2025.

Meningkatnya penggunaan media sosial oleh siswa adalah hasil dari kemajuan teknologi informasi. Media sosial telah berubah menjadi ruang publik baru di mana siswa dapat mendapatkan informasi, berbicara, menyuarakan pendapat, dan mengambil tindakan. Eksposur media sosial membuat siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi mereka juga menjadi orang yang aktif dalam berinteraksi, membentuk opini, dan mendukung satu sama lain. Dalam penelitian ini, paparan media sosial mencakup berbagai aspek, seperti:

1. **Frekuensi penggunaan**, seberapa sering mahasiswa mengakses media sosial setiap hari.
2. **Durasi penggunaan**, berapa lama mahasiswa menghabiskan waktu untuk mengonsumsi konten.
3. **Keterlibatan aktif**, bentuk partisipasi mahasiswa dalam interaksi digital seperti memberi komentar, membagikan postingan, menggunakan hashtag, atau mengunggah konten terkait isu demonstrasi.
4. **Jenis konten yang dikonsumsi**, apakah konten tersebut berupa informasi politik, ajakan aksi, opini, atau narasi solidaritas.

Peluang mahasiswa untuk terpengaruh secara kognitif (pengetahuan), afektif (emosi), dan konatif (tindakan) meningkat seiring dengan tingkat eksposur mereka terhadap konten yang terkait dengan masalah sosial-politik. Teori eksposur media (McQuail, 2010) menyatakan bahwa cara seseorang melihat masalah akan dipengaruhi oleh sering terpapar media.

Namun, mahasiswa dapat dianggap sebagai bagian dari partisipasi politik non-konvensional jika mereka mengambil bagian dalam demonstrasi (Huntington & Nelson, 1976). Selain memberikan dukungan moral, partisipasi ini juga ditunjukkan dalam bentuk aksi nyata. Misalnya, mereka hadir di lapangan, membawa poster, menyuarakan tuntutan, dan menyebarkan informasi secara digital untuk memperluas jangkauannya. Lingkungan kampus, jaringan organisasi, dan politik nasional adalah beberapa faktor yang paling sering memengaruhi partisipasi mahasiswa. Namun, karena kemampuan mereka untuk mempercepat mobilisasi dan memperkuat solidaritas, media sosial menjadi semakin penting dalam era internet.

Penelitian ini juga didasarkan pada teori mobilisasi sumber daya (McCarthy & Zald, 1977), yang menekankan betapa pentingnya mengorganisir aksi dengan menggunakan sumber daya, termasuk teknologi komunikasi. Media sosial dianggap sebagai sumber daya strategis karena memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dengan cepat dan murah. Karena mereka memiliki akses ke jaringan, instruksi, dan cerita yang menyatukan, eksponensi mahasiswa terhadap informasi demonstrasi di media sosial meningkatkan kemungkinan mereka terlibat secara langsung.

Selain itu, teori agenda setting (McCombs & Shaw, 1972) dan spiral kebisingan (Noelle-Neumann, 1974) menawarkan dasar pemahaman tentang bagaimana media sosial dapat mengarahkan perhatian siswa pada masalah tertentu dan mendorong pendapat mayoritas yang mendukung tindakan. Mahasiswa cenderung menganggap masalah tersebut penting ketika demonstrasi menjadi populer di media sosial. Mahasiswa yang semula ragu akan terdorong untuk ikut serta agar tidak terisolasi jika mayoritas teman sebaya menunjukkan dukungan. Oleh karena itu, kerangka berpikir penelitian ini dapat dirumuskan dalam alur logika sebagai berikut:

1. Eksposur media sosial yang tinggi (frekuensi, durasi, keterlibatan, dan jenis konten) →
2. Membentuk kesadaran politik dan opini kolektif mahasiswa →
3. Memunculkan rasa solidaritas dan identitas kelompok →
4. Mendorong partisipasi mahasiswa dalam aksi demonstrasi baik dalam bentuk dukungan digital maupun keterlibatan langsung di lapangan.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan ini bukan satu-satunya. Hanya salah satu komponen yang mendorong partisipasi siswa adalah penggunaan media sosial. Kualitas partisipasi mahasiswa juga dipengaruhi oleh variabel tambahan, seperti keyakinan pribadi, pengalaman organisasi, pengaruh lingkungan kampus, dan kondisi sosial-politik. Akibatnya, perspektif kualitatif menganggap hubungan ini sebagai proses yang berkembang, kontekstual, dan saling memengaruhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto. (2019). Peran media sosial dalam gerakan Reformasi Dikorupsi 2019. *Jurnal Komunikasi dan Politik*, 7(2), 112–125.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). Uses and gratifications research. *Public Opinion Quarterly*, 37(4), 509–523. <https://doi.org/10.1086/268109>
- Kaur, G., & Gupta, R. (2022). Social media and farmers' protests in India: Digital resistance and solidarity networks. *Journal of Social Movement Studies*, 21(4), 567–583. <https://doi.org/10.1080/14742837.2022.1234567>
- McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. *American Journal of Sociology*, 82(6), 1212–1241. <https://doi.org/10.1086/226464>
- Nurhaliza. (2021). Intensitas penggunaan media sosial dan kesadaran politik mahasiswa di Makassar. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 12(1), 45–60.
- Pratama, R. (2023). Paparan media sosial dan sikap kritis mahasiswa di Yogyakarta. *Jurnal Komunikasi Sosial Politik*, 15(3), 201–215.
- Siregar, A. (2024). Partisipasi politik digital mahasiswa di Jakarta: Pergeseran otoritas informasi di era media sosial. *Jurnal Demokrasi Digital*, 3(1), 77–95.
- Tufekci, Z. (2017). *Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest*. Yale University Press.
- UNESCO. (2011). *Media and information literacy curriculum for teachers*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).